

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu tahun 2020. Di dalam Undang-undang dasar 1945 bahwa sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada prinsipnya otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi kekuasaan pusat. Dalam proses desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sehingga terwujudnya pergeseran di dalam kekuasaan dari pusat ke daerah dan kota di seluruh Indonesia (Endah, 2016).

Dengan adanya desentralisasi, daerah menggunakan otonominya untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dengan inovatif dan kreatif. Dengan berlakunya undang-undang (UU) Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat (Krismansyah, 2017). Oleh karena itu besar kecilnya kewenangan yang diberikan atau dimiliki daerah otonom merupakan dasar pijakan yang paling sering digunakan untuk menentukan derajat otonomi (Endah, 2016).

Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah berhak untuk mengeluarkan berbagai kebijakan public akan tetapi dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga

dengan adanya suatu kebijakan maka pemerintah daerah dapat menyelesaikan masalah-masalah public yang terdapat di lingkungannya sendiri. Kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakekat dari suatu kebijakan. Dalam pencapaian hakikat kebijakan dapat dilihat dari sikap masyarakat. Apakah masyarakat mendukung serta menerima dalam melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak tidak mendukung kebijakan tersebut.

Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan dengan Undang-Undang (UU) No. 09 tahun 1967 yang terdiri dari empat tingkat II yaitu kotamadya Bengkulu, kabupaten Bengkulu utara, kabupaten Bengkulu selatan dan kabupaten rejang lebung. Tiga dari empat daerah tingkat II tersebut berada di sepanjang pesisir, yaitu kabupaten Bengkulu utara, Bengkulu selatan dan kota Bengkulu (Arianti & Cahyadinata, 2016). Pada tahun 2003 provinsi Bengkulu mengalami pemekaran wilayah sehingga sekarang terdapat enam kabupaten baru (Daerah Otonomi Baru). Dengan dibentuknya daerah otonomi baru agar wilayah tersebut dapat mengembangkan diri berdasarkan dengan potensi lokal yang dimiliki serta dapat menyelesaikan berbagai karakteristik permasalahan yang berbeda di setiap wilayah. Seperti di kota Bengkulu berhadapan dengan masalah lingkungan di akibatkan terjadinya urbanisasi sehingga memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Salah satu permasalahan lingkungan yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah sampah. Sampah merupakan masalah bagi umat manusia, karena sampah akan berdampak negative bagi kehidupan seperti: 1) sampah dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar, 2) sampah dapat menurunkan keindahan atau nilai estetika kota jika penanganan sampah yang buruk, 3) sampah dapat menyebabkan polusi udara dan menimbulkan bau tidak sedap, 4) sampah dapat menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan karena sampah yang tidak terangkut maka akan menyumbat ke saluran air (Mardiningsih, 2015).

Permasalahan sampah di kota-kota besar sudah menjadi permasalahan yang serius, di karenakan kota merupakan tempat terjadinya urbanisasi sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk tentu hal tersebut akan berdampak juga dengan jumlah konsumsi manusia sehingga dapat menghasilkan jumlah sampah yang semakin meningkat. Adapun penyebab dari permasalahan sampah di kawasan perkotaan yaitu bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pola konsumsi dan perilaku penduduk, aktivitas fungsi kota dan bangunan, serta permasalahan transportasi (Sudrajat, 2017). Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan berdampak juga dengan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang di hasilkan. Sampah dapat mengakibatkan berbagai permasalahan, di samping itu untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas.

Peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan juga tidak di barengi dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana di dalam pengelolaan sampah

sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi sangat kompleks, seperti sampah tidak terangkut maka akan terjadi pembuangan sampah secara liar, oleh sebab itu dapat mengakibatkan berbagai permasalahan seperti penyakit, lingkungan yang kotor, pencemaran lingkungan, adanya bau tidak sedap, bencana banjir dan lain sebagainya (Artiningsih, 2008). Oleh sebab itu pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia serta pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan sampah penting untuk dilakukan mengingat dampak negative yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Serta sampah juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 menjelaskan bahwa “memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Oleh karena itu amanat yang terkandung didalam undang-undang tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

Didalam pengelolaan sampah tidak hanya membutuhkan aspek peran serta masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen serta aspek pembiayaan (Krismansyah, 2017). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga perlu untuk dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, pengelolaan sampah

diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran dari masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara professional, efektif dan efisien (Mardiningsih, 2015).

Permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah juga terjadi di kota Bengkulu. Jika dilihat dari tingkat kebersihan kota Bengkulu cukup memperhatikan dikarenakan masih banyak ditemukan tumpukan-tumpukan sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan dan di kawasan penduduk. Untuk mendukung serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah pemerintah telah membuat sebuah kebijakan yaitu adanya Peraturan Daerah (PERDA) No. 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. Perda tersebut berisi tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan di kota Bengkulu beserta sanksi terhadap pelanggaran.

Menuntut penanganan yang optimal mengingat pentingnya didalam pengelolaan sampah maka pemerintah kota Bengkulu melalui instansi yang terkait secara structural mengemban tanggung jawab didalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota Bengkulu. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perda Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

Di dalam perda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di BAB III pasal 3 untuk penanganan sampah dilaksanakan oleh LPM dan Dinas. Dan di

perda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di BAB VIII pasal 35 di point pertama menjelaskan dalam pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas.

Namun pelaksanaan Perda Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah berjalan selama sepuluh tahun ini belum berjalan optimal. Hal ini di buktikan bahwa jika dilihat dari tingkat kebersihan kota Bengkulu cukup memprihatinkan di karenakan masih banyak di temukan sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan dan dikawasan penduduk. Hal tersebut membuktikan bahwa masih rendahnya kualitas di dalam pelayanan pengelolaan sampah di kota Bengkulu sehingga pada tahun 2015 membuat kota Bengkulu di kategorikan tidak layak untuk mendapatkan piala Adipura (Wijaya, 2013). Adapun data timbulan sampah yang ada dikota Bengkulu yaitu:

Tabel 1. 1

DATA TIMBULAN SAMPAH TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	TimbulanSampah (Kg/Hari
1.	SELEBAR	46.571	37.256,8
2.	KP MELAYU	28.571	22.858,4
3.	GD CEMPAKA	39.446	31.556,8
4.	SINGARAN PATI	39.661	31.6888,8
5.	RATU AGUNG	49,401	39.520,8
6.	RATU SAMBAN	24.697	19.757,6
7.	TELUK SEGARA	24.052	19.241,6
8.	SUNGAI SERUT	22.061	17.648,8
9.	M. BANGKA HULU	35.531	28.424,8
	JUMLAH	309.943,0	247.954,4

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Berdasarkan dengan data diatas bahwa Kecamatan ratu agung memiliki volume timbulan sampah yang paling banyak dikarenakan jumlah penduduk yang padat. Sampah di Kecamatan ratu agung bersifat heterogen (tidak seragam) hal tersebut disebabkan oleh dikecamatan ratu agung terdapat aktivitas yang berbeda-beda dari kegiatan masyarakatnya seperti sampah dari kegiatan Sekolah, Universitas, Rumah Tangga, Hotel dan pasar.Sama halnya di kawasan wisata taman remaja kota Bengkulu dan jalur hijau di lingkaran barat adanya pembuangan sampah secara liar yang dilakukan oleh masyarakat padahal tempat tersebut bukan tempat pembuangan sampah, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. 1

Taman Remaja Kota Bengkulu



Sumber : (Penulis, 2021)

Sedangkan di dalam Peraturan daerah No. 02 tahun 2011 Pasal 34 di point pertama telah dijelaskan bahwa : “Setiap orang di larang membuang sampah tidak pada tempat yang telah di sediakan”. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya kesadaran bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah

sembarangan serta kurangnya kepedulian bagi pemerintah mengenai pengelolaan sampah.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan terdapat sarana dan prasarana di dalam pengelolaan sampah juga dikatakan belum memadai. Seharusnya sampah tersebut cepat terangkut agar tidak terjadinya penumpukan sampah. Adapun data kendaraan angkutan sampah yang ada dikota Bengkulu yaitu :

Tabel 1. 2
Kendaraan Angkutan Sampah

No	Jenis Kendaraan dan Nomor Polisi	Jumlah Container
1.	Dump Truck BD 803 AY	1
2	Dump Truck BD 8096 AY	1
3	Dump Truck BD 8101 CY	1
4	Dump Truck BD 8079 AY	1
5	Dump Truck BD 8098 AY	1
6	Dump Truck BD 1001 AZ	1
7	Dump Truck BD 8028 AZ	1
8	Dump Truck 8029 AY	1
9	Dump Truck BD 8095 AY	1
10	Dump Truck BD 8071 AY	1
11	Dump Truck BD 8073 AY	1
12	Hilux BD 9071 AY	1
13	Dump Truck BD 8071 AY	1
14	L300 BD 9961 AZ	1
15	Dump Truck BD 4239 AZ	1
16	ISUZU Panther BD 9174 AY	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Seperti yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu mewawancarai dengan Bapak Firjoni Aprianto, ia mengungkapkan bahwa :

”terus terang saja ya kalau untuk sarana dan prasarana sekarang masih minim atau kurang jadi dari 9 kecamatan tersebut yang belum

maksimal atau belum tersentu yaitu 2 kecamatan muara bangkahulu dan kampong melayu karena tempatnya jauh dan pemukimannya juga belum padat jadi belum terlayani, jadi untuk sarana prasarana baik itu kendaraan dan sarana tempat sampah masih kurang”

Dari hasil penelitian di atas bahwa sarana prasarana mengenai persampahan yang ada dikota Bengkulu masih minim baik itu kendaraan ataupun sarana prasarana tempat sampah atau kontrainer. Sedangkan di dalam perda nomor 02 tahun 2011 BAB III tentang penanganan sampah di pasal 19 menjelaskan bahwa pemerintah kota wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik pada fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Oleh sebab itu mengapa permasalahan sampah yang ada dikota Bengkulu sulit untuk ditangani diakibatkan oleh masyarakat dan pemerintah saling lempar tanggung jawab didalam pengelolaan sampah. Masyarakat terus menyalahkan pemerintah bahwa masih kurangnya fasilitas dalam pelayanan sampah seperti kurangnya mobil pengangkut sampah, kontrainer ataupun tempat sampah. Dan sebaliknya pemerintah mengatakan bahwa masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sampah maka masyarakat juga harus sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jika pelaksanaannya dengan cara intensif dan disisentif dapat membuat masyarakat kota Bengkulu termotivasi untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan didalam Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Permasalahan sampah harus di tangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan lingkungan hidup yang bersih dan meningkatkan kesehatan bagi masyarakat (Hardiatmi, 2011). Dengan adanya ketidakpastian didalam kewenangan sehingga permasalahan sampah menjadi permasalahan yang cukup serius sehingga perlu ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang negatif di kota Bengkulu.

Hingga sekarang ini juga belum adanya gerakan dari masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dikarenakan masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai bagaimana cara dalam pengelolaan sampah. Seperti pemisahan sampah organik dan anorganik yang dapat menghasilkan pupuk kompos yang berguna untuk menyuburkan tanaman, ataupun mendaurulang sampah dengan memanfaatkan kembali sehingga dapat menghasilkan sebuah produk yang dapat di jual kembali. Jika masyarakat melakukan hal tersebut tentu akan mengurangi jumlah tumpukan sampah yang ada dikota Bengkulu. Maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa dikota Bengkulu jika dilihat dari system dan metode pengelolaan sampah yang efektif, ramah lingkungan dan ekonomis dikatakan belum efektif.

Serta pemerintah juga didalam penanganan sampah masih mengerakan petugas sampah dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengumpulkan sampah yang di ambil dari sisa yang di buang oleh masyarakat untuk di tumpuk ke TPS. Dari TPS sampah lalu di angkut dengan truk ke TPA air sebakul. Dengan angka yang di hasilkan perhari terlihat dari luas kawasan TPA air sebakul yang awalnya hanya seluas 3,5 ha menjadi 6,5 ha (Taslam, 2020). Dengan jumlah sampah yang

terus meningkat maka dikhawatirkan akan semakin menggunung sehingga kapasitas TPA yang tersedia di air sebakul akan semakin berkurang (Saryono, 2020). Menurut KASI Penanganan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bapak Firjoni Apriantobahwa ia mengatakan di TPA air sebakul juga sama sekali tidak ada pengelolaan sampah.

Setidaknya sejauh ini ada satu solusi di dalam penanganan sampah yang ada di kota Bengkulu, yakni pemerintah daerah bekerjasama dengan dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di kota Bengkulu yaitu IAIN, UMB (universitas muhammadiyah Bengkulu), Poltekes Kemenkes, Unived, dan Unihaz. Berdasarkan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, didalam pasal 15 ayat 1 dimaksudkan bahwa perguruan tinggi dapat mensinkronkan program persampahan dalam program studi dan diluar program studi. Tujuan tersebut untuk meminimalisir sampah yang ada di kota Bengkulu dilakukannya dengan cara 3R upaya tersebut untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau kawasan. Selanjutnya ada program jumat bersih di pantai zakat yang akan dilaksanakan oleh ASN kota Bengkulu dan program-program penanganan sampah lainnya.

Di dalam Peraturan daerah (PERDA) permasalahan sampah telah di jabarkan begitu lengkap akan tetapi hingga saat ini permasalahan sampah belum dapat di tangani dengan baik di kota Bengkulu. Hal tersebut di karenakan masih banyak di temukan tempat pembuangan sampah secara liar dilingkungan masyarakat serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai.

Berdasarkan dengan uraian di atas bahwa pelaksanaan Perda Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang belum berjalan optimal.

Berdasarkan dengan permasalahan sampah yang ada dikota Bengkulu peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu belum berjalan dengan optimal hal ini di sebabkan oleh : 1). Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola sampah menjadi barang yang dapat bermanfaat yang memiliki nilai ekonomis 2). Belum seluruh wilayah dikota Bengkulu terjangkau dengan pelayanan sampah 3). Tidak adanya kepastian hukum yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab kepada pelaku pelanggar Perda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah 4). Belum terlaksananya insentif dan disinsentif dalam perda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Insentif dan disinsentif merupakan bentuk apresiasi (insentif) bagi masyarakat yang melaksanakan pengelolaan sampah dan sanksi (disinsentif) bagi masyarakat yang melanggar dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Dengan tidak adanya dilaksanakan insentif dan disinsentif yang ada di dalam Perda sehingga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Perda Nomor nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam mengenai **Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Tahun 2020.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka di ajukan pokok permasalahan yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Tahun 2020 ?

1.3. Tujuan Masalah

Berdasarkan dengan pokok masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai adalah untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu Tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Di harapkan agar penelitian ini di jadikan sebagai referensi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Serta memberikan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pelayanan public khususnya dalam pengelolaan sampah.

1.5. Literature Review

Tabel 1. 3
Literature Riview

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian/Tahun	Hasil Penelitian
1	Rizqi Puteri mahyudin	Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan/ 2014	Hasil di dalam penelitian ini bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan system pembuangan akhir tradisional. Pembuangan akhir secara tradisional yang di maksud adalah hanya membawa sampah dari TPS (tempat pembuangan sementara) ke TPA (tempat pembuangan akhir). Di Indonesia TPA dapat di katakana belum sepenuhnya baik di karenakan masih dapat memberikan dampak yang negative bagi lingkungan yang ada di sekitar TPA. Maka bukan termasuk TPA pengelolaan sampah ya ng berkelanjutan
2.	I Nyoman Wardi	Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya/2011	Di dalam jurnalnya tersebut membahas bahwa masyarakat mengelola sampah dengan baik sehingga menjadi kompos serta dapat memberi keuntungan bagi masyarakat desa, serta dapat mendapatkan pendapatan desa, menampung tenaga kerja local serta dapat mengurangi pengangguran dan dapat memperoleh keuntungan social
3.	Rosita Chandrakirana	Penegakkan Hukum Lingkungsn di Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental	Di dalam jurnal tersebut membahas permasalahan lemahnya penegakkan hukum terhadap peraturan-peraturan serta sanksi tentang pengelolaan sampah yang mengakibatkan pelanggaran terhadap pengelolaan sampah masih terjadi

		Governance di Surakarta	
4.	Fiter Akbar	Implementasi Peraturan Daerah No. 02 tahun 2011 Kota Bengkulu Tentang pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu	Di dalam tesis ini menjelaskan peran dari masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan masih sangat minim
5.	Evi Permata Sari	Implementasi Peraturan No. 02 tahun 2011 di Kota Bengkulu Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah/ 2013	Di dalam tesis ini menjelaskan bahwa kedudukan dari pemerintah yang sangat startegis guna memberikan perlindungan terhadap lingkungan seperti pembuatan kebijakan serta dapat memberikan fasilitas dan mendorong gerakan kepedulian terhadap lingkungan. Serta keberadaan masyarakat juga sangat penting untuk berperan aktif di dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Karena segala dampak yang di hasilkan oleh lingkungan pihak masyarakatlah yang secara langsung merasakan.
6.	Donna Asteria dan Heru Herumen	Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya (Bank Sampah (waste Banks) As An Alternative Of Community Based waste Management Strategy In	Dengan adanya bank sampah dapat membawa adanya capacity building untuk masyarakat dengan mengusahakan terbentuknya kemandirian,kewadayaan,kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat untuk melakukan keikutsertaan di dalam mengelola lingkungan di komunitasnya

		Tasikmalaya)/2015	
7.	Mohamad Rizal	Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (studi kasus pada kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)/ 2011	Di dalam masalah lingkungan permasalahan sampah merupakan masalah yang penting untuk di selesaikan dengan baik. Di kabupaten Donggala dalam pengelolaan persampahan sudah berjalan dengan baik hal tersebut didilihat bahwa sarana prasarana mengenai pengelolaan sampah memadai. Akan tetapi jika dilihat dari partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan persampahan masih kurang dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan
8.	Hasbullah, Taufik Ashar, Nurmaini	Analisis Pengelolaan Sampah Di Kota Subulussalam Tahun 2011/ 2019	Di dalam jurnal ini membahas bahwa di beberapa tempat umum dikota subussalam masih banyak sampah berserakan. Di setiap kelurahan yang ada di subussalam telah disediakan tempat sampah tetapi sebagian besar tidak digunakan sebagaimana mestinya.
9.	Nur rahmawati Sulistiyorini, dkk	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug/2015	Produksi sampah yang semakin meningkat di barengi dengan bertambahnya jumlah produk yang di konsumsi oleh masyarakat. Adapun yang dapat di lakukan untuk mengatasi peningkatan sampah yaitu dengan cara mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat. Di dalam penelitian ini membahas bahwa adapun bentuk dari peran masyarakat di dalm upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan sama-sama kerja bakti dan ikut serta di dalam pengelolaan sampah.

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu terletak persamaan objek yang diteliti yaitu Implementasi kebijakan di dalam pengelolaan sampah dan juga sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta persamaan selanjutnya mengenai mekanisme prosedur dan dalam pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana di dalam pengelolaan sampah serta partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya relevansi penelitian di atas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai masih rendahnya kesadaran masyarakat di dalam hal pengelolaan sampah diakibatkan oleh tidak adanya sanksi atau penegakkan hukum mengenai pelanggaran di dalam membuang sampah.

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah perbedaan waktu dan tempat, pada penelitian ini memfokuskan secara umum bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di kota Bengkulu untuk itu hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat di kota Bengkulu agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah di kota Bengkulu.

1.6. KERANGKA TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Adapun pengertian dari implementasi kebijakan menurut (Syaukani, 2004) implementasi merupakan rangkaian aktivitas yang kemudian menghantarkan hasil sebuah kebijakan yang dibuat kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut

dapat membawa hasil yang ingin dicapai. Adapun rangkaian tersebut antara lain pertama mempersiapkan peraturan yang interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan penetapan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga bagaimana menyampaikan secara kongkrit kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Menurut Grindle 1980 dalam (Imronah, 2009) menyatakan implementasi adalah proses umum tindakan administrative yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan menurut van Meter dan Horn dalam (Imronah, 2009) menyatakan bahwa implementasi kebijakan ialah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu hal merupakan proses yang dimiliki logika bottom-up dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan disisi lain di dalamnya memiliki logika top-down dalam arti penurunan alternative kebijakan yang abstrak atau makna menjadi tindakan yang kongkrit dan mikro (Samodra, 1994).

Adapun menurut (Nugroho, 2009) bahwa implementasi kebijakan merupakan cara untuk mencapai sebuah tujuan, agar mengimplementasikan kebijakan public terdapat dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui dengan formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut atau sering disebut dengan Peraturan Pelaksanaan.

Sedangkan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III ialah: “implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya implementasi kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan public tidak akan terwujud. Begitupula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik”

Dari pengertian di atas maka (Edward, 1980) menunjukkan variabel yang memiliki peran penting di dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu

a. Komunikasi

Komunikasi kebijakan public agar dapat mencapai keberhasilan, dalam mengimplementasikan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group). Apabila tidak jelas dalam penyampaian sebuah tujuan dan sasaran suatu kebijakan serta tidak memberikan pemahaman mengenai tujuan dan sasaran kebijakan yang

menyebabkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan dari kelompok sasaran .

Maka dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang sangat diperlukan yaitu: 1). Penyaluran (transmisi) yang baik dapat menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan) 2). Adanya kejelasan yang di terima oleh pelaksana kebijakan dan 3). Adanya konsistensi yang di berikan dalam pelaksanaan kebijakan karena jika yang di komunikasikan berubah-ubah akan membingungkan yang bersangkutan.

b. Sumber Daya

Di dalam implementasi kebijakan sumberdaya merupakan hal yang penting baik itu sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan yang sudah ditetapkan walaupun sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

c. Disposisi

Di dalam implementasi suatu disposisi merupakan karakteristik, sikap yang di miliki oleh implementor kebijakan

seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sifat demokratis. Implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik juga maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Jika memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dalam Implementasi kebijakan maka implementasi menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana sebuah kebijakan baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi swasta.

Selanjutnya implementasi kebijakan menurut (Mazmanian & Paul, 1983) sebagaimana yang dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan yang telah di paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai

actor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Dan terdapat tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut (Mazmanian & Paul, 1983) yaitu :

1. karakteristik masalah (*tractability of the problems*), masalah public menurut (Subarsono, 2010) memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan masalah yang terjadi, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proposi kelompok sasaran terhadap total populasi dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), menurut (Subarsono, 2010) kebijakan public memiliki beberapa karakteristik antara lain kejelasan dari isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar dukungan kebijakan dari para institusi pelaksanaan, kejelasan dan konsisten aturan-aturan yang ada di badan pelaksana, seberapa banyak tingkat komitmen dari para aparat terhadap tujuan dari kebijakan, dan seberapa luas akses dari kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi didalam implementasi kebijakan.
3. variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), jika menurut (Subarsono, 2010) bahwa kebijakan lingkungan juga memiliki karakteristik antara lain, kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan

public terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (constituency Groups) dan tingkat dari komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Oleh sebab itu dari penjabaran diatas dapat ditarik sebuah kesimpulannya yaitu dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan maka yang pertama harus menganalisis masalah yang ada agar dapat mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi factor-faktor apa saja yang dibutuhkan pada saat mengimplementasikan dan lingkungan kebijakan yang mempengaruhi baik atau tidaknya secara internal dan eksternal

2. Politik Lingkungan

Adapun pengertian politik lingkungan menurut Gary Peterson, Brayant, Vayda, Balaike, dan Brookfield, Rocheleau, dan Abe ken-ichi yang dikutip didalam (Hidayat, 2005).

Menurut Paterson, bahwa politik lingkungan ialah pendekatan membahas mengenai masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk suatu pergantian yang dinamik antara lingkungan, manusia dan antar kelompok yang bermacam-macam didalam masyarakat baik dalam skala individu atau secara keseluruhan.

Menurut Brayant, politik lingkungan dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha untuk memahami sumber-sumber politik, serta kondisi lingkungan yang dapat menjadikan suatu jaringan dari pengertian lingkungan.

Menurut Blaike dan Brookfield bahwa politik lingkungan adalah suatu yang dapat memahami kompleksitas yang saling berhubungan antara masyarakat local, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem.

Menurut Abe ken-ichi bahwa politik lingkungan sebagai usaha intelektual yang secara kritis menganalisis masalah sumber daya alam dan asal usul kerusakan sumber daya tersebut secara politik ekonomi

Selanjutnya menurut Vayda bahwa politik lingkungan adalah suatu metode terapan oleh para ahli-ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, yang dikenal dengan ‘*progresivve contextualization*’ (kontekstualisasi yang maju). pendekatan ini memulai dengan actor (pelaku) dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang langsung dan mempertimbangkan suatu konteks apa mereka berbuat atau tidak berbuat, dalam cara khusus terhadap suatu sumber daya alam.

Adapun menurut Michael Watts yang dikutip dalam (Robbins, 2012) bahwa ia berpendapat “*Political ecology is the complex relations between natur and society throught a careful analysisof what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods*”. Politik lingkungan merupakan cara memahami hubungan komepeks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan control atas sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Politik lingkungan adalah politik yang mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus membuat kebijakan yang tepat untuk menangani masalah lingkungan, serta politik lingkungan memberikan berbagai pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi pengelolaan sumberdaya alam (Siahaan, 2020). Maka dari itu untuk membuat kebijakan yang tepat maka (Kraft, 2011) menawarkan model didalam proses kebijakan yang terdiri dari enam tahap yaitu: agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, policy and program evaluation and policy change. Dan menurut (Kraft, 2011) terdapat tiga perspektif di dalam politik lingkungan antara lain : perspektif ilmu pengetahuan, perspektif ekonomi, dan perspektif etika lingkungan.

Politik lingkungan menganalisis peran institusi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan sumberdaya alam dan lingkungan. Disini peran masyarakat, pemerintah, swasta, lembaga pembangunan, pendidikan dan penelitian juga dianalisis. Politik lingkungan menganalisis persoalan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Akibat dari perilaku dan tindakan manusia maka diperlukan sebuah eksternalitas yang kemudian membutuhkan peran pemerintah atau bentuk tata kelola lain untuk menangani masalah lingkungan(Mahdi, 2015).

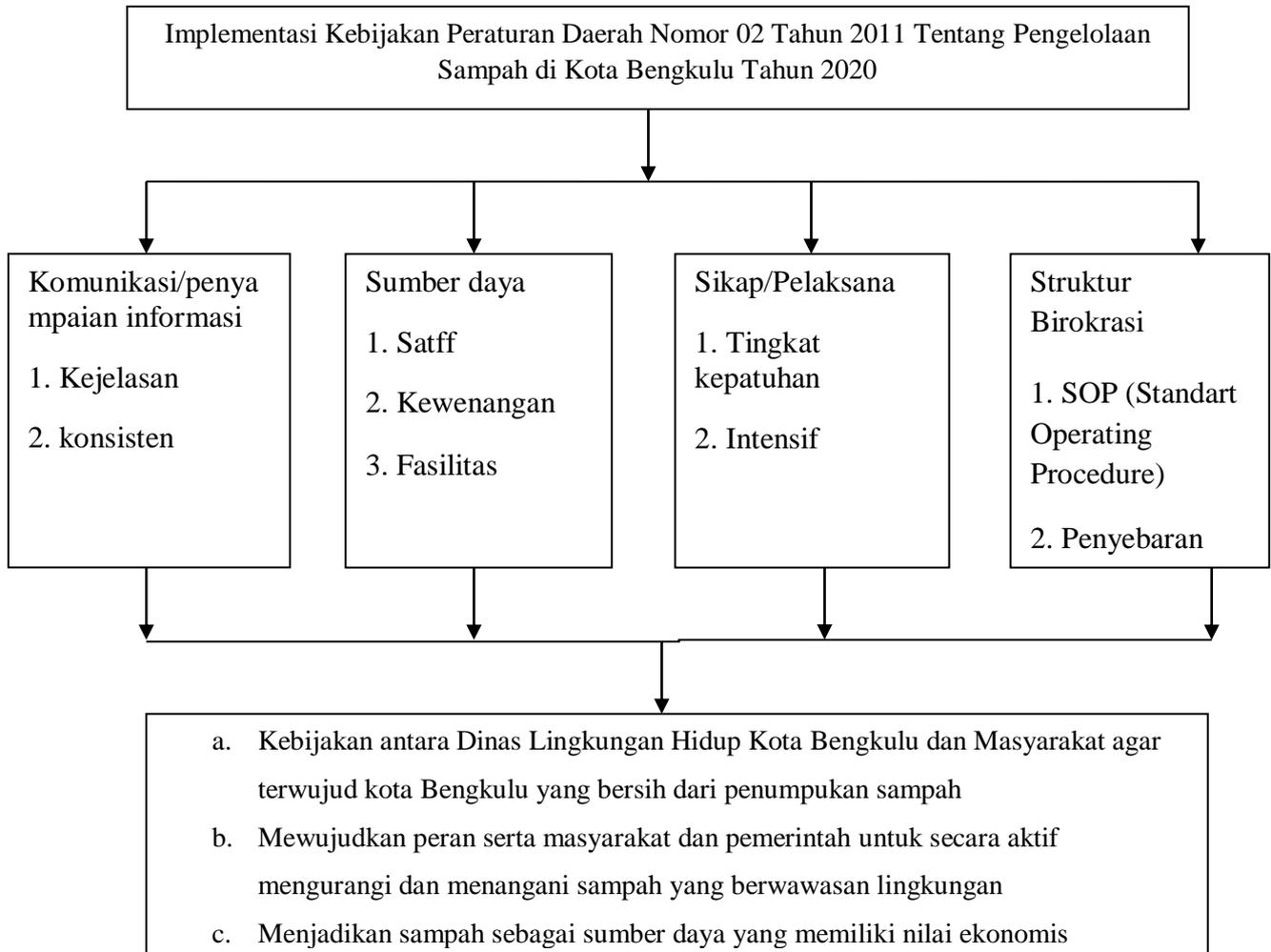
Jika membahas mengenai politik lingkungan tidak bisa lepas dari tanggung jawab Negara dan masyarakat. Negara perlu untuk melakukan kerjasama politik antar bangsa untuk saling dukung dalam upaya mengurangi dan menghindari bencana akibat kerusakan dan pengrusakan lingkungan.

Hingga sekarang ini permasalahan lingkungan hidup diakibatkan oleh sampah karena sampah merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Maka dari itu pentingnya kebijakan politik didalam mengatasi lingkungan. Pentingnya adanya politik lingkungan dibutuhkan untuk meynyelaskan fenomena lingkungan yang terjadi baik itu antar masyarakat dengan lingkungan, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggapi masalah lingkungan, korelasi politik dengan lingkungan, ataupun planning (rencana) startegis dari pemerintah di dalam mengatasi persoalan lingkungan dan bagaimana mengembangkan lingkungan hidup sebagai prioritas pelestarian Negara.

1.7. KERANGKA PEMIKIR

Gambar 1. 2

Kerangka Pemikir



1.8. DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu definisi yang masih abstrak dan mengacu pada ide-ide atau konsep lain yang memiliki kemungkinan juga masih abstrak dalam rangka menjelaskan konsep pertama pada

penelitian(Priyono, 2016). Adapun definisi konseptual di dalam penelitian ini adalah:

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan public merupakan sebuah penerapan dari hasil sebuah kebijakan yang telah di sahkan dan di tetapkan kepada sasarannya yaitu publik atau masyarakat.

b. Politik Lingkungan

Politik lingkungan adalah merujuk kepada kajian intelektual tentang fenomena-fenomena lingkungan yang terjadi. Baik itu relasi antar masyarakat dengan lingkungan, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggapi masalah lingkungan, korelasi politik dengan lingkungan, ataupun planning (rencana) strategi pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan dan bagaimana mengembangkan lingkungan hidup sebagai prioritas pelestarian Negara.

2. Definisi Operasional

Definis Operasional adalah definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau yang lengkap tentang apa yang harus diamati serta bagaimana mengamatinya dengan mengambil beberapa rujukan yang bersifat empiris (Silalahi, 2012).

Tabel 1. 4

Tabel Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan	1. Karakteristik Masalah dalam pengelolaan Sampah 2. Karakteristik Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah 3. Variabel Lingkungan
2.	Politik Lingkungan	1. Peran Masyarakat dan Pemerintah di dalam menangani perosalan sampah dikota Bengkulu

1.9. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang akan penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Menurut (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020) bahwa penelitian kualitatif sebuah upaya melakukan secara rasionalisasi dan interpretasi/penafsiran terhadap realitas kehidupan berdasarkan apa yang dipahami oleh si peneliti. Oleh sebab itu penelitian kualitatif melibatkan sejumlah data lapangan/empiris yang menggambarkan kejadian-kejadian secara alamiah dan problematic serta makna dari kehidupan masing-masing individu manusia.

Dengan adanya data dan informasi yang diperoleh dari data lapangan/empiris melalui interaksi dalam jangka waktu yang lama dengan para informan atau responden merupakan hal yang bermanfaat

didalam penelitian kualitatif supaya penelitian tersebut bisa mendapatkan objek penelitiannya dengan perspektif yang berbeda.

Terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan didalam penelitian kualitatif yaitu : Pendekatan Naratif, pendekatan fenomenologis, pendekatan grounded theory, pendekatan etnografis, dan pendekatan studi kasus (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020). Adapun studi kasus didalam penelitian ini ialah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Peraturan Daerah Nomor. 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, Studi Kasus di kota Bengkulu.

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Christianingsih, 2007) bahwa penelitian merupakan instrument utama (key instrument) untuk mengumpulkan dan menginterpretasi data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan secara natural setting (kondisi yang alamiah) (Sugiyono, 2005). Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal di dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

a. wawancara

Menurut (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020), wawancara merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan didalam mengumpulkan data penelitian. Sederhananya teknik wawancara merupakan sebuah proses interaksi antara

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung tatap muka atau luring (Yusuf, 2014) dalam (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020).

Adapun jenis wawancara di dalam penelitian ini ialah wawancara baku terbuka, yaitu menggunakan pertanyaan yang baku, urutan pertanyaan, kata-kata dan cara penyajian pun sama untuk setiap responden. Keluwesan mengadakan pertanyaan pendalaman (probing) terbatas, dan hal itu bergantung pada situasi wawancara dan kecakapan pewawancara. Wawancara di lakukan sangat penting untuk mengurangi sedapat-dapatnya variasi yang bisa terjadi antara seorang terwawancara dengan yang lainnya. Artinya untuk menghindari suatu kekeliruan (Moleong & Lexy, 2011). Secara spesifik untuk mempermudah melakukan wawancara ialah dengan melakukan teknik wawancara terstruktur karena peneliti bisa menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden (Moleong & Lexy, 2011)

b. Dokumentasi

Teknis dokumentasi merupakan cara didalam pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen juga menyimpan informasi penting dan fakta yang dapat digunakan sebagai tambahan didalam data penelitian kualitatif. Oleh sebab itu

teknik dokumentasi didefinisikan sebagai pengumpulan data didalam penelitian untuk menelusuri data historis (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020).

Menurut (Hamidi, 2004) bahwa teknik dokumentasi merupakan informasi yang berawal dari catatan penting baik itu dari lembaga atau organisasi ataupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian merupakan pengendalian gambar-gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik didalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi merupakan sebuah bagian didalam pengumpulan data. Observasi merupakan mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010).

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini adalah Kota Bengkulu khususnya di Dinas Lingkungan Hidup kota Bengkulu dan masyarakat kota Bengkulu.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber atau informan yang akan di teliti. Adapun informan di dalam penelitian ini ialah staff/pegawai di Dinas Lingkungan Hidup kota Bengkulu dan masyarakat kota Bengkulu. Data primer diperoleh melalui

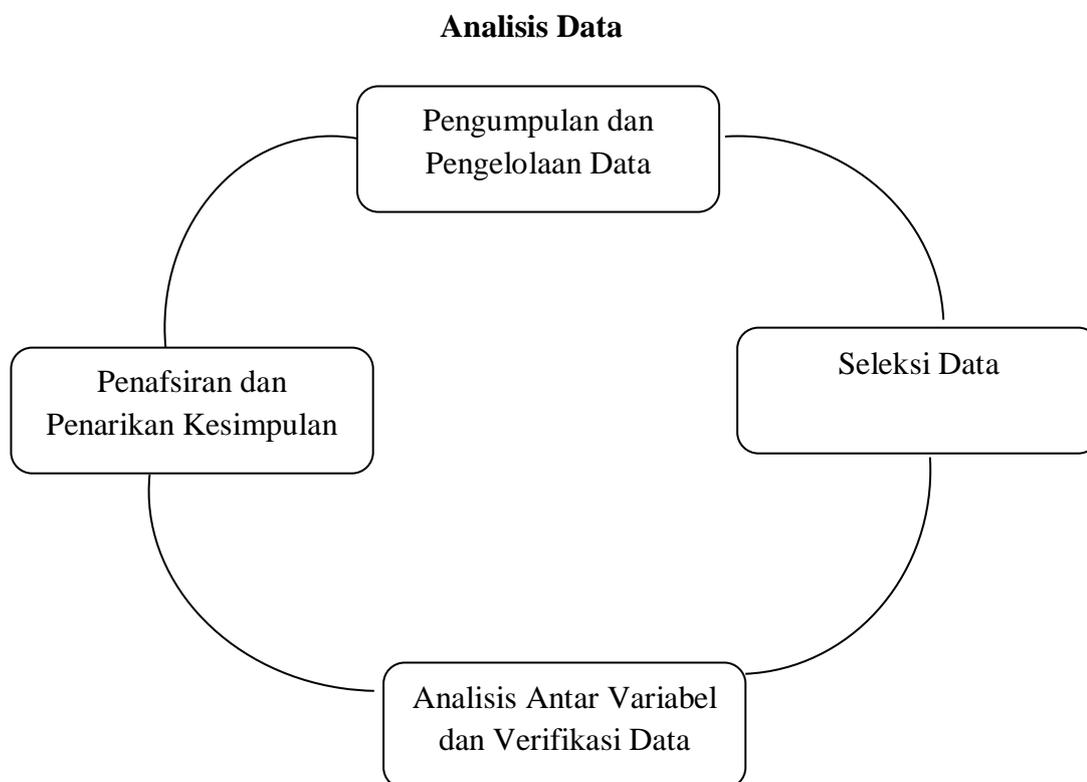
interview dan juga dokumen-dokumen. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis secara tidak langsung dari sumber yang akan di teliti. Data sekunder dimaksud dapat berupa data dari internet ataupun dari penelitian selanjutnya.

4. Teknik Analisis Data

Menurut (Bogdan & Biklen, 2007) yang dikutip oleh (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020) analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lain sebagainya. Analisis data dilakukan supaya data tersebut dapat dipahami dengan mudah sehingga dapat memberikan informasi terhadap temuan kepada orang lain.

Terdapat proses di dalam analisis data kualitatif antara lain menurut (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020).

Gambar 1. 3



Sumber : Penelitian Kualitatif (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020)

1. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada tahap ini setelah dilakukannya proses pengumpulan data baik itu melalui wawancara, dokumentasi, observasi, ataupun FGD adalah mengelola data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Seleksi Data

Kegiatan memilih dan memilah data yang berguna dan relevan untuk dipakai didalam proses analisis baik itu data berupa data table dan gambar, data deskriptif, dan menyisihkan data-data yang dianggap kurang relevan dengan topic penelitian.

3. Analisis Antar-variabel dan Verifikasi Data

Usaha untuk mengaitkan temuan satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator yang lainnya.

4. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Merupakan sebuah usaha untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal berdasarkan analisis antar-variabel dan verifikasi data. Kemudian hasil dari penafsiran inilah yang kemudian dijadikan dasar pedoman untuk ditarik kesimpulan yang menjadi bab akhir dari rangkaian penelitian.

1.10. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantaranya bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh :

1) Bab I

Pendahuluan yang terdiri dari

- a. Latar belakang masalah;
- b. Rumusan masalah;
- c. Tujuan penelitian;
- d. Manfaat penelitian;
- e. Literature Riview
- f. Kerangka teori;
- g. Kerangka pemikir;
- h. Definis konseptuan dan operasional;

- i. Metode penelitian;
- j. Sitematika penelitian;

2) Bab II

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu tahun 2020. Dengan tujuan untuk memudahkan penelitian.

3) Bab III

Menjelaskan tentang implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Bengkulu dalam pengelolaan permasalahan sampah yang ada di kota Bengkulu.

4) Bab IV

Penutup, berisi penyimpulan dan kata penutup yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya.